

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS
DALAM MENGAWASI PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA
PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :
BIMO PUTRO SEJATI
115010100111015**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS
DALAM MENGAWASI PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA
PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA**

Bimo Putro Sejati, Imam Ismanu, S.H., MS., Amelia Srikusumadewi, S.H.,

M.Kn

bimoputrosejati@yahoo.co.id

Abstrak

Lembaga kepailitan dalam hal ini Pengadilan Niaga adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Di dalam lembaga kepailitan ini, terdapat hakim pengawas yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi kurator yang mebereskann harta pailit milik debitur yang selanjutnya akan dibagikan pada tiap-tiap kreditur. Undang – undang kepailitan sudah mengatur dengan jelas mengenai tugas dan kewenangan hakim pengawas kepailitan, namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya hakim pengawas tentu saja tidak bisa lepas dari hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan.

Kata kunci : tugas dan kewenangan hakim pengawas, hakim pengawas kepailitan, pengadilan niaga.

Abstract

Institutions bankruptcy Commercial Court in this case is an institution authorized to examine and decide cases of bankruptcy. In this bankruptcy institutions, there is a inspector judge who has the duty and authority to oversee the care of a curator who belong to the debtor's bankruptcy estate which would then be distributed to each creditor. Rule bankruptcy has set clear about the duties and authority of the inspector of bankruptcy judges, but in carrying out its duties and authorities inspector judge certainly can not escape from the constraints that occur in the field.

Keywords: duty and authority of the inspector judge, the judge inspector bankruptcy, the commercial court.

A. Pendahuluan

Di dunia perniagaan, para pengusaha tak selalu sukses dalam memajukan dan mengembangkan usaha perdagangannya tersebut. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha dan perdagangan kesulitan atau berhenti membayar utang pinjamannya tersebut pada saat jatuh tempo hari bayar kepada pihak Kreditor yang telah meminjamkan dananya. Pada saat pengusaha atau Debitor tersebut tidak sanggup untuk membayar utang – utangnya kepada para pihak Kreditor, maka para pihak Kreditor akan saling berlomba untuk mendapatkan pelunasan utang dari pihak Debitor dengan cara menyita barang - barang milik pihak Debitor tersebut. Penyitaan barang - barang milik Debitor tersebut sebagai pengganti pelunasan atas piutangnya kepada pihak kreditor.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak kreditor atas barang – barang milik pihak debitor yang dijadikan sebagai pengganti pelunasan piutangnya kepada pihak kreditor, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan membenahi sistem hukum mengenai pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor dengan mengupayakan penyelesaian yang adil, yaitu dengan jalan pembentukan peraturan Kepailitan yang dapat digunakan secara cepat, adil, terbuka dan efektif, serta sesuai dengan perkembangan kondisi zaman saat ini¹.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Redjeki Hartono mengatakan :

“lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar / tidak mampu membayar. Lembaga

¹ J. Djohansyah. **Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, hal 26

Kepailitan mencegah / menghindari dua hal berikut yang keduanya merupakan tindakan – tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri”.²

Lembaga hukum resmi pemerintah yang berhak menangani perkara kepailitan menurut Undang - Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Yang dimaksud pengadilan menurut UU Kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga. Terhitung sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit yang selanjutnya akan dilelang.

Tanggal putusan pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Namun harus diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan langsung dengan harta kekayaannya.³

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan

² Sri Redjeki Hartono, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal 22

³ Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 107

harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.⁴

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan seseau dengan porsi besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato, yaitu :

Pasal 1131

“Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan.”⁵

Inti dari kedua ketentuan prinsip di atas adalah bahwa kebendaan milik debitor baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bersama – sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”⁶. Yang fungsinya memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap terpenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

⁴ Ibid hal 108

⁵ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 291

⁶ Jeery Hoff, **Undang Undang Kepailitan Indonesia**, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000, hal 13

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada Kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan pihak Kurator sendiri ataupun salah satu dari pihak Kreditor yang bersangkutan. Untuk mengawasi pemberesan dan pengurusan harta pailit tersebut maka diangkatlah seorang Hakim Pengawas dalam Kepailitan. Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) seperti yang diatur dalam pasal 65 UU Kepailitan adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁷

Dalam kasus kepailitan ini, hakim pengawas akan menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan oleh kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah hakim pengawas diperlukan. Kurator akan menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaannya setiap tiga bulan.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?
2. Apa hambatan hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?

⁷ Abdul R. Saliman. **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005, hal.. 122

⁸ Imran Nating, **Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 102

3. Bagaimana upaya hakim pengawas mengatasi hambatan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?

C. Pembahasan

Hakim Pengawas memiliki peranan yang sangat penting setelah terjadinya putusan pailit, terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang harus segera dilakukan setelah jatuhnya putusan pailit. Tugas dan Kewenangan tersebut diantaranya :⁹

1. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas Secara Layak Dengan Segera Melakukan Pengumuman

Tugas Hakim Pengawas setelah kepailitan diumumkan ke media massa adalah menentukan hari, tanggal waktu dan tempat rapat kreditor pertama. Meskipun tindakan ini dituliskan terpisah dengan tindakan mengumumkan kepailitan yang diatur pada pasal 15 ayat (4) UUK namun sebaiknya pengumuman tentang penetapan hari, tanggal waktu dan tempat Rapat Kreditor pertama dilakukan bersamaan dengan dibuatnya penetapan pengumuman kepailitan pada dua surat kabar harian. Sehingga pengumuman pertama pada surat kabar tersebut, selain memuat pengumuman kepailitan, juga memuat pengumuman tentang hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama tersebut.

Rapat kreditor pertama sangatlah penting, karena di dalam rapat ini dibicarakan hal-hal yang banyak menentukan proses kepailitan nantinya, misalnya pengenalan, jadwal rapat-rapat selanjutnya, komunikasi dengan

⁹ Wawancara dengan Bapak Harjanto selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Surabaya Pada Tanggal 10 Maret 2015

Kurator dan Hakim Pengawas, mekanisme pengambilan keputusan dan sebagainya.

Idealnya pengumuman ini memuat pula agenda rapat kreditor secara singkat, sehingga semua kreditor yang membaca bisa mengetahui secara umum acara yang akan dilaksanakan

1)¹⁰

2. Mengidentifikasi aset dan memastikan dilakukannya pembekuan dan pengamanan aset

Menjaga dan mengurus harta pailit adalah bentuk pertanggungjawaban kurator kepada kreditor. Setelah putusan pailit dibacakan, kurator bertugas untuk mengumumkan kepailitan kepada publik dan mulai melakukan pencatatan harta pailit, paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat pengangkatan dirinya sebagai kurator. Hasil pencatatan ini diberikan kepada Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh publik secara gratis.

3. Memastikan Dilakukannya Pengecualian Benda - Benda Tertentu Dari Aset Pailit

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (pasal 24).

Menurut pasal 22, beberapa hal dapat dikecualikan dari harta pailit, yaitu:

¹⁰ Andriani Nurdin, **Buku Pedoman Hakim Pengawas Tentang Penyusunan Penetapan (Naskah Uji Coba)**, Jakarta, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2009, hal 9

Apabila muncul perbedaan pendapat antara Debitor dan Kurator/Kreditor mengenai benda-benda apa atau berapa besarnya uang yang dapat diberikan kepada Debitor pailit, maka Hakim Pengawas yang akan memutuskan hal ini. Dalam menentukan besarnya uang yang dapat dikecualikan dari harta pailit secara adil, Hakim Pengawas perlu melihat secara obyektif kebutuhan Debitor.¹¹

4. Memimpin Rapat Verifikasi Utang Dan Prosedur Renvoi

Hakim pengawas harus mengawasi jalannya pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh pihak kurator. Hakim pengawas berperan dalam rapat verifikasi dan renvoi.¹² Pencocokan (verifikasi) piutang / utang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Pada tahap ini nanti akan ditentukan mengenai pertimbangan terhadap kreditur dan urutan hak-hak masing masing kreditur. Rapat pencocokan piutang dipimpin oleh hakim pengawas, sedangkan berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan panitera (Pasal 126 ayat (4)).

5. Memberikan Penetapan Pada Tahap Insolvensi Bila Diperlukan

Jika tahap perdamaian tidak ada, ditolak kreditur ataupun majelis hakim menolak untuk mengesahkan perdamaian maka akan ada tahap insolvensi.¹³ Yang jelas, jika debitor sudah dinyatakan insolvensi, dia sudah benar-benar pailit dan hartanya segera akan dibagi-bagi meskipun

¹¹ Ibid, hal 12

¹² Wawancara dengan Bapak Heru Susanto Selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Surabaya Pada Tanggal 10 Maret 2015

¹³ Wawancara dengan Bapak Heru Susanto Selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Surabaya Pada Tanggal 10 Maret 2015

hal ini tidak berarti bahwa bisnis dari perusahaan pailit tersebut tidak bisa dilanjutkan.¹⁴

6. Memberikan Izin Kurator Untuk Likuidasi Aset

a. Penjualan Aset oleh Kurator dan Alasan Penjualan

Salah satu tugas kurator yaitu melikuidasi aset-aset milik debitur yang pailit, yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut kepada pihak mana pun sehingga diperoleh uang tunai sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan, serta sesuai pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun Undang-Undang lainnya.

b. Cara Melikuidasi Aset

Bagaimana cara menjual harta debitur pailit juga hal yang harus selalu diperhatikan dalam proses pemberesan harta pailit. Untuk itu harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1) Pertimbangan Yuridis

Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, Undang-Undang mana dan Pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

2) Pertimbangan Bisnis

¹⁴ Munir Fuady, **Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hal 20

¹⁴ Ibid, hal 127 - 129

Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memerhatikan pertimbangan bisnis. Jika perlu, dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya. Karena itu, harus dipertimbangkan, antara lain, hal-hal sebagai berikut:

1. Kapan saat yang tepat untuk menjual aset debitor tersebut agar diperoleh harga yang tinggi;
2. Apakah lebih baik dijual secara borongan atau dijual *retail*;
3. Apakah lebih baik dijual sebagian-sebagian atau dijual seluruh bisnis dalam satu paket;
4. Apakah perlu pakai perantara professional atau tidak;
5. Apakah perlu dilakukan tender atau tidak; dan
6. Apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

7. Pembagian Aset

a. Kapan Aset Harus Dibagi

Pada prinsipnya aset baru dibagi-bagi kepada kreditor setelah seluruh aset debitor terjual dan menjadi *cash*, yakni apabila *cash* (uang tunai) sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah ada terlebih dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.

b. Dasar Hukum Pembagian Aset

Pembagian aset-aset debitor pailit kepada kreditor-kreditor dan seluruh yang berhak lainnya merupakan tahap terakhir dalam seluruh proses kepailitan. Ketentuan tentang pembagian aset ini cukup terperinci dengan melibatkan berbagai Undang-Undang atau peraturan sebagai dasar hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas di lapangan tentu saja tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, terdapat hambatan – hambatan yang dapat memperlambat jalannya pemberesan harta boedel pailit. Hambatan yang di alami oleh hakim pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Faktor penghambat hakim pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat terjadi diantaranya sebagai berikut :¹⁵

1. Kurator yang kurang aktif

Hambatan tersebut bisa berasal dari kurator yang diberi kewenangan untuk membereskan harta boedel pailit tersebut. Kurator yang kurang aktif dalam memberikan laporannya mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Hal ini terjadi pada kasus pailitnya CV. JOYO MULYO yang berkedudukan di Jalan Sawunggaling I/5 Kletek, Sepanjang kabupaten Sidoarjo.

Pada kasus ini pihak kurator dirasa kurang aktif dalam memberikan laporannya mengenai pemberesan harta pailit yang

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Harjanto selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 10 Maret 2015

harus dilakukannya setiap tiga bulan sekali kepada hakim pengawas. Pihak kurator hanya memberikan laporan mengenai pemberesan harta pailitnya yang pertama sejak putusan pailit dijatuhkan.

Pelaporan kurator kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas kurator itu sendiri terdapat pada pasal 74 ayat (1) Undang – undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi :

“kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.”

Dalam prakteknya di lapangan, ada saja kurator yang tidak mematuhi aturan yang ada sesuai dengan pasal 74 ayat (1) UUKPKPU tersebut.

2. Kejujuran dan kemauan debitor bekerja sama

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan (pasal 24 UUKPKU). Menurut pasal 22, beberapa hal dapat dikecualikan dari harta pailit yaitu :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan

keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan hakim pengawas, atau;
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Dari hal tersebut dapat muncul perbedaan pendapat antara debitor dan kurator / kreditor mengenai benda-benda apa atau berapa besarnya uang yang dapat diberikan kepada debitor pailit, maka hakim pengawas yang akan memutuskan hal ini. Hal yang perlu dipertimbangkan hakim pengawas antara lain :

- a. apakah debitor benar – benar membutuhkan benda tersebut ?
(untuk pengecualian benda)

berapa besar standar kebutuhan hidup debitor yang dianggap wajar ? (untuk pengecualian pendapatan debitor).

Upaya yang dilakukan hakim pengawas dalam menangani hambatan tersebut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Kurator yang kurang aktif

Di sini pihak hakim pengawas akan memberikan teguran secara tertulis berupa surat yang ditujukan kepada pihak kurator agar segera memberikan laporan kerjanya dalam membereskan harta

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Harjanto selaku Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 10 Maret 2015

pailit. Tidak hanya teguran secara tulisan, hakim pengawas juga dapat memberikan teguran secara lisan dengan menghubungi pihak kurator yang mendapat kewenangan untuk membereskan harta pailit tersebut.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 74 ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi :

“hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Jika dalam waktu seminggu pihak kurator tidak juga memberikan laporannya mengenai pelaksanaan tugasnya membereskan harta pailit, maka di sini hakim pengawas berhak untuk mengusulkan penggantian kurator kepada hakim pemeriksa / hakim pemutus perkara. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 71 ayat (1) :

“pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/ atau mengangkat kurator tambahan atas :

- a. permohonan kurator sendiri;*
- b. permohonan kurator lainnya jika ada;*
- c. usul hakim pengawas;*
- d. permintaan debitor pailit.”*

Dalam kasus CV. JOYO MULYO yang telah disebutkan, pihak kurator mengirimkan surat pengunduran diri kepada hakim pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas pengunduran dirinya sebagai kurator yang menangani pailitnya CV. JOYO MULYO. Setelah mendapat beberapa kali peringatan dan teguran dari hakim pengawas untuk segera memberikan

laporannya mengenai pemberesan harta pailit yang dilakukannya, pihak kurator mengundurkan diri dengan alasan bahwa pihak kurator tidak dapat melanjutkan tugasnya kembali sebagai kurator dari CV. JOYO MULYO dikarenakan pihak kurator sedang mengani banyak perkara di kantornya sehingga pihak kurator menginginkan penggantian kurator atas dirinya agar tidak mengganggu proses jalannya pemberesan harta pailit.

2. Kejujuran dan kemauan debitor bekerja sama

Hakim pengawas harus melihat kewajiban-kewajiban (jika ada) debitor yang mesti dipenuhi untuk membiayai hidupnya, seperti tunjangan istri (apabila bercerai), biaya hidup anak, dan sebagainya. Pasal 22 (c) UUKPKPU secara khusus mengecualikan semua pendapatan untuk tujuan tersebut dari harta pailit.

- a. Pertanyaan – pertanyaan yang diajukan hakim pengawas pada kedua belah pihak (debitor dan kreditor / kurator) dapat menjadi semacam alat pembanding antara kebutuhan debitor dengan hak kreditor. Bagi debitor, berapapun jumlahnya tidak akan cukup, dan sebaliknya bagi kreditor, berapapun nilainya akan terasa terlalu banyak.
- b. Apabila ada permohonan pengecualian, maka kebutuhan hidup harus dipertimbangkan dari kebutuhan hidup standar bulanan debitor yang harus diputuskan kasus per kasus (tergantung biaya hidup debitor). Kebutuhan hidup standar tersebut dapat meliputi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan. Hakim pengawas dapat merujuk pada

pengeluaran debitor beberapa bulan terakhir untuk memperkirakan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut, dalam hal ini beban pembuktian ada pada debitor. Apabila debitor bersikeras pada pendapatnya dan dapat mengganggu berlanjutnya proses kepailitan, hakim pengawas dapat mengingatkan debitor bahwa pendapatan yang dapat dikecualikan tersebut bukanlah hak debitor, namun merupakan diskresi dari hakim pengawas.¹⁷

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penelitian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pembersan harta pailit dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya mengacu pada undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam prakteknya di lapangan, hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya tidak dapat sepenuhnya menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan pihak kurator yang tidak memberikan laporan

¹⁷ Andriani Nurdin, Op.Cit, hlm 18-20

setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai pemberesan harta pailit yang dilakukannya kepada hakim pengawas terutama untuk kasus pailitnya CV. JOYO MULYO.

2) Hambatan – hambatan yang dihadapi hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya baik dari pihak kurator maupun debitor dapat memperlambat proses pemberesan harta pailit yang tentunya ini dapat merugikan kepentingan dari pihak kreditor yang mengharapkan cepat terlunasinya utang-utang debitor yang dijatuhi putusan pailit. Padahal di bidang perniagaan, uang dan waktu merupakan suatu hal yang penting dalam melanjutkan usaha para kreditor yang mengharapkan pelunasan utang-utangnya.

3) Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada, hakim pengawas telah mengacu pada undang-undang yang ada dan buku pedoman dimilikinya sehingga hakim pengawas dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

2. Saran

Saran – saran yang dapat penulis berikan kepada pihak pengadilan terutama hakim pemutus dan hakim pengawas yang menangani kasus kepailitan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Dalam memilih kurator, pihak hakim pemeriksa atau pemutus seharusnya dapat memilih kurator yang sekiranya dapat aktif dalam mebereskan harta pailit dan menyampaikan laporan – laporannya kepada hakim pengawas. Sehingga tidak terjadi adanya kurator yang memiliki kinerja yang kurang bagus dan kurang aktif dalam membersekan harta pailit dan memberikan laporannya kepada hakim pengawas.
- 2) Hakim pengawas di sini harus lebih tegas dalam memberikan peringatan kepada pihak kurator sehingga kurator bisa dengan segera memberikan laporannya, dan apabila ada kurator yang kurang baik kinerjanya segera mengusulkan penggantian kurator kepada hakim pemutus atau hakim pemeriksa perkara tersebut sehingga kurator bisa cepat diganti dan pemberesan harta pailit dapat segera cepat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- Djohansyah J. , **Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001
- Fuady Munir, **Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Hoff Jeery, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Nating Imran, **Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Nurdin Andriani, **Buku Pedoman Hakim Pengawas Tentang Penyusunan Penetapan (naskah uji coba)**, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, 2009
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Saliman Abdul R. , **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005